

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu komponen strategis bagi kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2004-2009 menunjukkan sumbangan sektor migas rata-rata sebesar 10,19% (BPS, 2012). Selain itu dari sisi penerimaan negara pada APBN, sejak tahun 2005 hingga 2010 sektor migas menyumbang rata-rata sebesar 25% (Keuangan, 2012). Demikian sehingga pengelolaan migas menjadi salah satu komponen vital dalam mewujudkan ketahanan energi yang menjadi bagian dari ketahanan nasional.

Masalah tentang isu keamanan energi mulai menarik para penstudi Hubungan Internasional ketika terjadi pengurangan pasokan minyak secara mendadak dari Timur Tengah kepada negara-negara Eropa dan Amerika di tahun 1970-an. Keadaan ini memaksa negara untuk memikirkan kembali keamanan energinya. Kebutuhan yang sangat besar akan energi berasal dari negara-negara industri maju yang memerlukan bahan bakar tersebut untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Mayoritas negara ini tidak memiliki energi yang cukup sehingga memerlukan pasokan energi dari luar negeri. Perusahaan energiminyak dan gas multinasional pun hadir di negara-negara yang kaya akan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energy tersebut.

Negara Indonesia adalah salah satu negeri dengan kekayaan migas yang sangat banyak. Seiring bertambahnya populasi dan pesatnya teknologi, ketergantungan manusia terhadap energi akan terus meningkat. Indonesia adalah salah satu negeri dengan kekayaan migas yang banyak. Cadangan minyak bumi Indonesia yang telah terbukti berjumlah 4,23MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan cadangan gas Indonesia yang telah terbukti ialah 108 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet). (BP Migas, 2011). Tidak semua negara memiliki jumlah energi yang sama sehingga pergerakan lintas batas negara terjadi untuk memasok energi ke berbagai belahan dunia. Interaksi inilah yang menciptakan hubungan antar negara maupun antara aktor negara dan non-negara dalam mengelola energi. Sehingga energy security berkaitan erat dengan ketersediaan energi yang memadai, akses dan jalur distribusi yang aman serta harga yang terjangkau.

Migas menjadi komoditas ekspor terpenting Indonesia sejak tahun 1970-an. Bahkan sebelum tahun 2006, Indonesia sempat menjadi pengeksport LNG (Liquified Natural Gas) terbesar di dunia selama hampir tiga decade. (Nugroho, (2011)). Minyak bumi Indonesia menyumbang sekitar 0,4 persen dari seluruh cadangan terbukti minyak bumi dunia dan cadangan terbukti gas alam Indonesia menyumbang 1,6 persen dari seluruh cadangan terbukti gas alam dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan migas terbesar di Asia Tenggara sangat menarik penguasa modal

Dalam kebijakan pengelolaan migas, negara mengalami pasang surut antara untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan asing. Bahkan dalam bahasa sarkasme Indah Dwi Qurbani menyatakan (Indah Dwi Qurbani, Agustus 2012) Pada tataran implementasi pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi diarahkan hanya untuk investasi dan ekspor, sehingga terdapat indikasi adanya politik hukum obral minyak dan gas bumi, dengan tidak adanya strategi pencadangan sumber minyak dan gas bumi untuk kebutuhan rakyat dimasa depan. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan kontrak production sharing sebagai kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia yang mengalami beberapa generasi dan masing-masing generasi mempunyai prinsip yang berbeda.

Perusahaan multinasional mulai berpartisipasi dalam mengeksploitasi sektor tambang Indonesia sejak mendapat desakan pihak swasta untuk dapat berperan dalam sektor pertambangan di Indonesia sehingga membuat pemerintah Belanda saat itu mengeluarkan Undang-Undang Pertambangan Indische Mijnewet 1899. Dimana didalam Peraturan ini memberikan izin pertambangan melalui system konsesi yang berlaku hingga 75 tahun kepada perusahaan swasta, dan ini menandai masuknya negara Indonesia dalam jaringan perdagangan migas global. Menurut BP Migas (Badan Pengelola Minyak dan Gas), sekitar 85,4 persen dari 137 Wilayah Kerja pertambangan migas nasional saat ini dimiliki oleh perusahaan migas asing. Perusahaan nasional hanya menguasai sekitar 14,6 persen Wilayah Kerja dan delapan persen di antaranya dikuasai Pertamina.

Empat kontraktor asing terbesar di Indonesia adalah ExxonMobil, Chevron, Shell, dan Total dimana mereka menguasai cadangan minyak bumi 70 persen dan cadangan gas alam 80 persen serta memiliki kapasitas produksi 68 persen minyak bumi dan 82 persen gas alam. (Nugroho, (2011), p. 108). Keberadaan perusahaan-perusahaan asing dalam produksi minyak di Indonesia sangat signifikan. Di bidang minyak, Chevron bahkan memproduksi 51 persen dari seluruh total produksi minyak di Indonesia. Sedangkan untuk gas alam, perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesia memproduksi 34 persen dari total produksi gas alam Indonesia.

Perusahaan migas nasional dalam negeri Indonesia belum banyak yang berani mengambil langkah untuk maju dalam industri ini. Lain halnya dengan perusahaan migas asing yang telah memiliki pengalaman serta modal yang banyak. Perusahaan multinasional ini bahkan mengklaim dirinya dapat menaikkan pendapatan nasional dengan meningkatkan produksi serta dapat mengedukasi tenaga kerja Indonesia. (Cho Oon Khong , 1986. ) Akan tetapi pada kenyataannya, perusahaan migas ini tidak melakukan transfer teknologi kepada Indonesia yang menyebabkan pengelolaan migas masih dikuasai asing. Akhirnya produksi migas tidak terkontrol dengan baik. Terbukti Indonesia yang dulunya adalah negara anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) harus keluar dari keanggotaannya di tahun 2005.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kebutuhan akan minyak sebesar 1,3 juta bph (barell per hari) sedangkan produksi nasional negara ini hanya mencapai 910.000 bph (barell per hari). Maka dari itu untuk menutupi kekurangan pasokan ini.

Indonesia harus mengimpor minyak dari negara lain. Akan tetapi pada September ini Indonesia kembali masuk menjadi anggota OPEC, hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Investasi dan Produksi Agus Budi Wahyono.

Ketersediaan energi adalah kunci bagi suatu negara untuk dapat mensejahterakan rakyatnya dan membangun perekonomian ke tingkatan yang lebih maju. Kenaikan harga minyak bumi yang pernah melonjak tajam di tahun 2003 menjadi peringatan bagi negara-negara untuk serius merencanakan keamanan energinya. Kehadiran perusahaan migas asing di Indonesia yang diharapkan dapat membantu negara ini dalam pengelolaan migas ternyata tidak berjalan mulus. Ditengah kebutuhan akan minyak yang semakin meningkat, ekspor minyak dari produksi perusahaan migas asing tetap berlangsung tiap tahunnya dan di tahun 2010 ekspor minyak Indonesia berjumlah 1121 juta barel. Hal ini tentu kontras dengan kenyataan bahwa akses akan listrik dan bahan bakar Indonesia termasuk yang rendah di Asia.

Energi bagi sebuah negara merupakan denyut nadi dan nyawa untuk menggerakkan segala bidang kehidupan. Jika energi suatu negara dikuasai negara lain, maka negara tidak mempunyai kedaulatan. Baik di mata rakyat, maupun di kancah internasional. Tersedianya energi sebagai sumber daya alam menempati posisi penting dalam isu ekonomi politik internasional. Konsumsi energi dunia yang terus meningkat sejak tahun 1990-an dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun

2020. Kehadiran perusahaan migas asing di sektor migas yang sangat dominan tentu berpengaruh terhadap ketersediaan energi. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **“Kebijakan Tata Kelola Pengadaan Migas di Indonesia Pada Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”** yang mematok ketersediaan dan keamanan migas sebagai acuan keberhasilan kebijakan tata kelola pengadaan migas di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :“Bagaimana kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam tata kelola pengadaan migas?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam upaya untuk menganalisa masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis menggunakan teori decision making process, konsep energy security dan juga konsep

## 1. Decision making proses

Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to Internasional Politics*. Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan actor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain.

Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri. Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang *vacum*. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai

hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem.

Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara :

a. Situasi politik domestik

Bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional. faktor-faktor lain itu.

b. Situasi ekonomi dan militer domestic.

Maksudnya adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

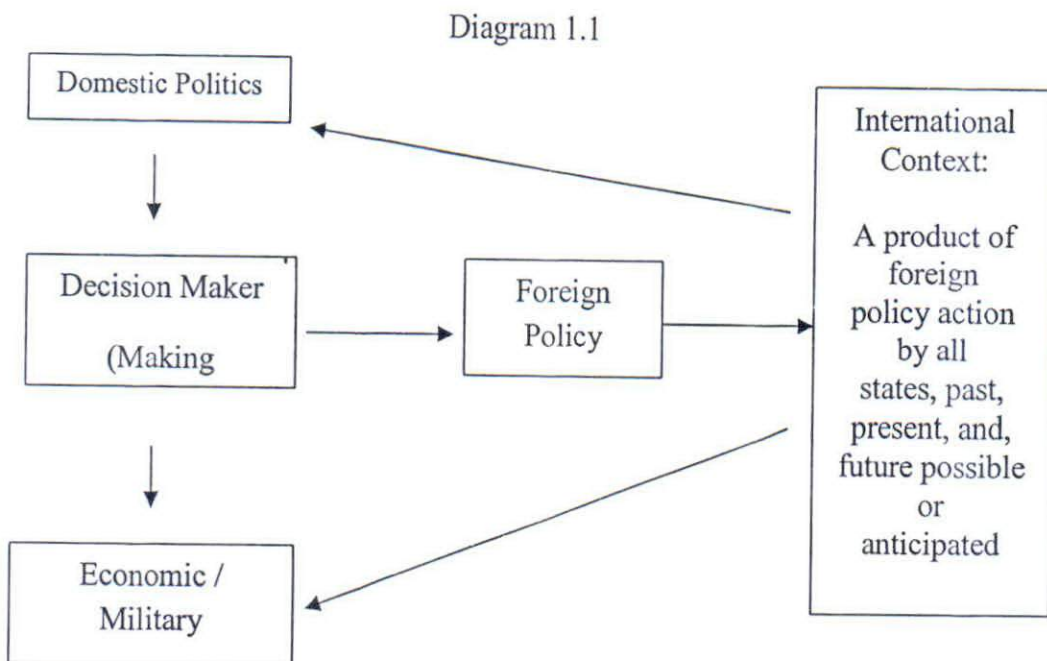
c. Konteks internasional



Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

Penjelasan tersebut lebih terinci dapat disimak dengan diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri, sebagai berikut:

#### Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri



Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terdapat tiga model, yaitu: The democratic model; pluralist model; atau ruling elite model. tapi biasanya para analisis kebijakan AS umumnya mengikuti salah satu dari tiga model tersebut:

### 1) Democratic model

Model ini berpegang bahwa suatu kebijakan itu merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan 'by the people and for the people', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Namun, ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan diatas karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih, dan para pejabat tidak selalu punya persepsi akurat atas pilihan-pilihan publik, atau mengabaikannya sama sekali. Democratic model cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari foreign policy-making dibanding wilayah kebijakan lain.

### 2) Pluralist model,

Pada model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam decision-making process. Pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari bargaining and compromise diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan. Disini, mayoritas publik tidak terlibat. Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan behaviourism, saat beroperasi dibawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak demokratis.

Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai

dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami salah satu sistem politik terkomples di dunia, dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

### 3) Ruling elite model

Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, terkadang berbentuk apa yang disebut "military industrial complex", mungkin juga actor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "policyinfluencers". Menurut D.Coplin juga menjelaskan policy influencer system merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan policy influencers terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan policy influencers karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, policy influencers membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan mereka diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan policy influencers tidak dipenuhi pengambil keputusan

maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan policy influencers kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

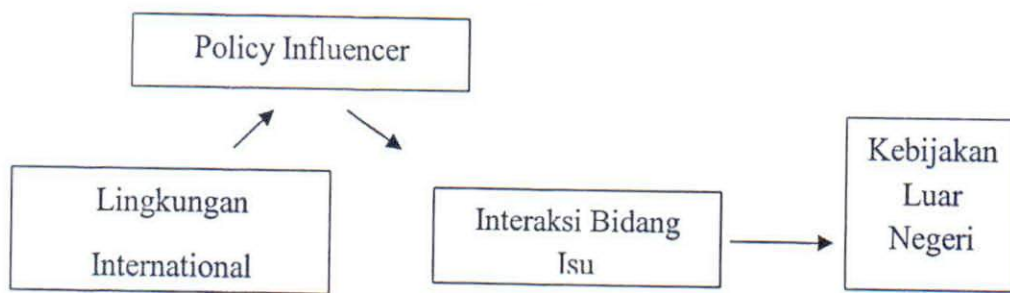
Coplin membedakan policy influencers menjadi empat macam:

1. Bureaucratic influencer, misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai policy influencer kadang juga menjadi pengambil keputusan. Bureaucratic influencer memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, bureaucratic influencer memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.
2. Partisan influencer, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam system demokrasi.
3. Interest influencer, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. Interest influencer memakai beberapa metode

untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga bureaucratic dan partisan influencer. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, interest influencer pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

4. Mass influencer, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri. Keempat tipe policy influencers itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki dengan para pengambil keputusan. Untuk menganalisis hubungan tersebut, Coplin menjelaskannya melalui Gambar di bawah ini :

Diagram 1.2



Dalam model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ini, lingkungan internasional bertindak sebagai rangsangan bagi para pengambil keputusan serta bagi policy influencers. Tanda panah menyilang diatas masing-masing menunjukkan input yang diterima untuk dijadikan pertimbangan pengambil keputusan kebijakan luar negeri dan policy influencers. Karena perbedaan pandangan dalam melihat situasi internasional, keduanya lantas mengambil posisi berbeda dalam menanggapi satu isu. Karenanya, policy influencers akan berupaya mempengaruhi para pengambil keputusan melalui interaksi bidang isu yang ditunjukkan dengan tanda panah yang bertemu. Berikutnya, tanda panah lurus menunjukkan interaksi bidang isu yang berhasil melahirkan kebijakan luar negeri.

## **2. Konsep energy security**

Energi memainkan peran penting dalam keamanan nasional dari setiap negara tertentu sebagai bahan bakar untuk menyalakan mesin ekonomi. Ancaman terhadap keamanan energi termasuk ketidakstabilan politik beberapa negara produsen energi, manipulasi pasokan energi, persaingan lebih sumber energi, serangan terhadap menyediakan infrastruktur, serta kecelakaan, bencana alam, terorisme, dan ketergantungan pada negara-negara asing untuk minyak. Energy security sebagai konsep dapat dilihat dari berbagai dimensi baik itu militer, ekonomi politik dan

Konsep energy security dalam penelitian ini hanya akan mengambil dimensi ekonomi politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Yergin bahwa energy security sederhananya adalah ketersediaan pasokan energi yang cukup dengan harga yang terjangkau. (Yergin, 2006). Selain itu, keamanan energi dapat diartikan juga sebagai kemampuan sebuah perekonomian untuk menjamin ketersediaan dari sumber pasokan energi dalam waktu berkelanjutan dengan harga energy berada di suatu level yang tidak akan memberi efek buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi. Tidak ada definisi baku soal energy security. Hampir setiap negara memiliki pemahaman masing-masing sesuai urgensi dan geopolitik negara.

Energy security tidak boleh diartikan sekedar keamanan energi belaka, akan tetapi lebih dimaknai sebagai jaminan pasokan energi di sebuah negara pada kurun waktu tertentu. Artinya sejauh mana pemerintah bersangkutan mampu menjamin keadaan atau ketersediaan stock energi bagi dinamika bangsa dan negara. (The Global Review, Indonesia, Rusia, dan G-20, 3 Mei 2013)

Menurut Dirgo D Purbo, pakar geopolitik dan geo-ekonomi serta dosen pada beberapa pendidikan kedinasan dan perguruan tinggi. (Dirgo D. Purbo, 24 Januari 2012) Kata kuncinya adalah 4-A yaitu availability, acceptibility, accesibility, affordibility. Adapun 4-A tersebut antara lain:

**Availability** :Ketersediaan energi. Hal yang mutlak dipastikan ialah asal dan sumbernya. Dalam catatan ini mengambil contoh Cina. Ia memilih Kaspia yang kaya

sumber energi sebagai partner, dengan pertimbangan selain kedekatan geografi juga di kawasan tersebut ada beberapa negara penghasil minyak lainnya seperti Kazaktan, Turkmenistan, Kyrgistan dan Uzbekistan. Yang terbanyak memang Kazaktan karena memiliki cadangan 30 trilyun barel serta menjadi ranking ke-11 dunia. Ini merupakan terbesar kedua di Asia setelah Rusia. Kemudian maksud availability disini boleh dimaknai, bahwa Kazaktan merupakan “lumbung minyak”nya Cina dalam jangka waktu yang relatif panjang.

**Acceptibility** : Intinya bahwa energi dimaksud dapat diterima atas pertimbangan lingkungan dan keamanan. Dibanding minyak misalnya, batu bara cenderung polutif. Minyak lebih menguntungkan secara ekonomis dan bisa diolah menjadi bentuk energi lain serta mudah disalurkan meski permintaan tinggi. Maksud acceptibility di atas, bahwa minyak lebih dapat diterima baik dari sisi lingkungan maupun keamanan daripada batu bara.

**Accessibility** : Artinya dapat diakses. Sebagai contoh supply 44% minyak Cina berasal dari Timur Tengah, 27% dari Brazil, Libya, Angola, Sudan dan lainnya yang harus ditempuh melalui perairan serta memakan waktu. Sementara di satu sisi, beberapa pemasok Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Irak, dan Oman ialah sekutu dekat Paman Sam rival beratnya. Dari aspek accessibility, bahwa supply energi dari Timur Tengah melalui perairan apabila beralih ke Kazaktan via jalur darat akan



**Affordability** : Keterjangkauan baik biaya maupun daya beli. Misalnya, 62% minyak Cina dari Saudi Arabia, Oman, Sudan, Kuwait, Brazil, dan Libya melalui perairan. Sudah tentu hal ini sangat berisiko serta memakan waktu dan biaya bila dibanding supply melalui pipa dari Rusia, Iran dan Kazaktan. Transportasi jalur pipa lebih rendah resiko, waktu dan biaya daripada via kapal-kapal tangki, ataupun jalur kereta api.

Menurut laporan APERC (Asia Pacific Reseach Energy Centre), energy security merupakan kemampuan atas suatu ekonomi untuk menjamin ketersediaan sumber persediaan energi dalam keadaan yang berkelanjutan dengan harga energy yang berada pada suatu level yang tidak akan berefek buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi.

Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dari persediaan energi, seperti :

- a. Ketersediaan dari cadangan bahan bakar, baik secara domestic maupun secara eksternal
- b. Kemampuan sebuah ekonomi untuk mendapatkan persediaan yang dapat memenuhi permintaan energi
- c. Level dari sebuah diversifikasi sumber ekonomi energi dan diversifikasi

- d. Akses akan sumber bahan bakar, dalam hal ketersediaan yang berhubungan dengan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi energi.
- e. Hal geopolitik yang mempengaruhi perolehan sumber.

Untuk merefleksikan pentingnya resiko yang akan hadir, APERC mendesain indikator keamanan pasokan energi bagi suatu Negara yaitu:

- a. Diversifikasi dari Permintaan energi primer. Dalam indicator ini, jika suatu perekonomian bergantung hanya pada satu sumber energi maka itu berarti negara tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan pasokan energi. Sebaliknya jika perekonomian suatu negara menggunakan sumber energi yang bervariasi dan rata terbagi maka negara tersebut memiliki resiko yang sedikit terhadap keamanan pasokan energi.
- b. Ketergantungan import energi, jika perekonomian suatu negara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi maka resiko akan keamanan pasokan energinya juga akan tinggi.
- c. Portofolio bahan bakar non carbonindicator mengukur usaha suatu perekonomian untuk berpindah dari portofolio bahan bakar karbon. Bahan bakar karbon (fosil) adalah sumber energi yang tidak dapat terbaharui dan suatu waktu dapat habis terpakai. Perpindahan ke bahan bakar non karbon di perlukan untuk menjaga agar sumber energi tidak mudah terganggu.
- d. Ketergantungan import minyak(di timbang dari intensitas konsumsi minyak sebagai sumber energi primer) Indicator ini melihat ekspor dan impor minyak

suatu negara yang dipengaruhi oleh konsumsi minyak sebagai sumber energi primer.

- e. Ketergantungan import minyak dari Timur Tengah. Tingkat Ketergantungan suatu negara akan pasokan minyak dari Timur Tengah berpengaruh terhadap tingkat resiko keamanan pasokan energi. Semakin tinggi ketergantungan yang terjadi, maka resikonya pun akan semakin besar.

Keamanan Energi di Indonesia sangat penting dilakukan guna memberikan cadangan energi di masa mendatang. Proses kerjasama keamanan energi tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa MNC migas dengan membuat beberapa point-point kerjasama. Beberapa MNC migas tersebut dianggap memiliki sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam proses pengadaan migas, proses penciptaan sumber energi migas baru, penciptaan stasiun pengolahan migas yang berbasis ramah lingkungan dan ekonomis. Hal ini mutlak dilakukan agar negara Indonesia sedikit demi sedikit tidak tergantung kepada sumber energi fosil yang semakin lama semakin habis persediaanya.

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber energi fosil khususnya migas akan berdampak kepada terganggunya neraca anggaran belanja negara dan akan berimbas kepada situasi ekonomi dan politik Indonesia. Tatkala politik domestik bisa dipengaruhi dinamika eksternal, sebenarnya kemandirian dan otonomi negara dimaksud yang perlu digugat, artinya bagaimana strategi, antisipasi, membendung, merespon dll pengaruh dari luar. (Dr. Susaningtyas Kertopati, 2012)

### 3. Konsep MNC

PMN sering kali diterjemahkan dari Multi National Corporation ataupun Transnational Corporation, kadang-kadang konotasi kedua istilah tersebut dianggap memiliki pengertian yang sama, tetapi banyak pula pakar ekonomi politik yang berusaha membedakan masing-masing. MNC mengandung pengertian suatu perusahaan yang bergerak atau beroperasi di luar negerinya sendiri dengan saham yang terdiri dari beberapa negara, sedangkan TNC pengertiannya adalah lebih luas dari pada hanya sekedar suatu perusahaan sebagaimana pengertian MNC. Luasnya arti TNC karena dilihat daripada aktifitasnya, besarnya operasi modal di luar negeri yang mencakup banyak negara dan memiliki manajemen yang bersifat komprehensif atau menjangkau skala perdagangan dan industri global.

MNC pada umumnya merupakan suatu usaha yang berkapasitas besar dan bersifat oligopolistic (dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), jumlah penjualannya melebihi beberapa ratus juta US dollar dan mempunyai cabang tersebar di berbagai negara. (Department of Economic and Social Affairs United Nation, 1973) Sumantoro dalam tulisannya mengenai MNC memandang PMN dari berbagai aspek. Dari segi politik, fokus sentral kepada PMN sebagai subjek dalam hubungan internasional, terkait dengan kekuatan politiknya di tingkat nasional dan internasional, serta pola manajemennya yang terpusat sehingga membawa pengaruh pada penguasaan informasi sebagai kekuatan politik, pun kekuatan ekonomi bagi perusahaan tersebut

Dari segi hukum, fokus sentralnya terletak pada PMN sebagai badan hukum yang dapat merupakan cabang, usaha patungan atau perusahaan yang dimiliki umum. Juga struktur pemilikan usaha, anggaran dasar perusahaan, bentuk hukum pengelolaannya serta penyelesaiannya jika ada sengketa hukum. Hal yang terakhir ini juga terkait dengan masalah yuridiksi hukum negara penerima modal. Dari segi ekonomi, fokus sentralnya pada aspek-aspek faktor produksi, modal keahlian manajemen dan keahlian teknologi, serta praktek-praktek usaha yang terkait dengan persaingan, besarnya pasar, monopoli, dan sebagainya.

Sementara itu ada beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh penulis-penulis ekonomi politik, diantaranya adalah Stephen Gilland dan David Law. Sedangkan dari beberapa pandangan lainnya tentang pengertian, definisi, dan istilah yang digunakan umum bagi PMN ini banyak disebut-sebut sebagai: direct invesment, international bussiness, the international corporated group, dan the US corporate monster, serta sejumlah nama lain untuk menyebut hal serupa. Dalam prakteknya terdapat suatu perbedaan tujuan dan scope kegiatan antara negara dan MNC. MNC jelas berorientasi laba sedangkan negara memiliki tujuan mensejahterahkan rakyatnya. MNC memiliki kekuatan ekonomis dan nation state memiliki sovereign power. Sovereign power ini sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan aturan masuknya MNC ke suatu negara. Dan dengan menerima kekuatan MNC, Negara dapat bekerjasama dengan MNC dalam area ekonomi untuk memperoleh national interest.

Tujuan utama dan pokok dengan adanya hubungan simetris pemerintah Indonesia kepada beberapa MNC migas yang berinvestasi di Indonesia diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Efek positif tersebut bisa berupa tersedianya beberapa lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur guna menunjang kelancaran arus barang modal dan jasa, memberikan sumber devisa bagi bangsa Indonesia. Bagi Indonesia MNC memiliki tujuan utama hanya mengejar keuntungan semata merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah Indonesia sebelum melakukan proses kerjasama dengan beberapa MNC asing terlebih dahulu mempelajari kontrak kerjasama agar kelak di kemudian hari tidak merugikan Indonesia. Kontrak kerjasama yang berisi tentang perjanjian perjanjian antara Indonesia dengan beberapa MNC migas sebaiknya dapat memaksa beberapa MNC tersebut memberikan keuntungan lebih kepada Indonesia dan justru tidak memberikan kerugian yang timbul akibat dari proses kontrak kerjasama tersebut berlangsung.

#### **D. Hipotesa**

Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan SBY dalam tata kelola pengadaan migas adalah :

1. Peran SBY dalam membuat kebijakan mencari sumber energy alternative baru
2. SBY mengeluarkan kebijakantentang diversifikasi energi pada masa

3. Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi asing ke beberapa perusahaan migas asing.

## **E. Metode Penelitian**

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi perpustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching di berbagai sumber data internet (Suharsono., 1996).

## **F. Teknik Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yaitu menggambarkan tentang kebijakan SBY dalam tata kelola pengadaan migas di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku yang diamati, sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka penulis perlu menggabungkan dua jenis penelitian ini karena diperlukannya data data kuantitatif untuk menunjang dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangka waktu selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari awal kepemimpinan sampai akhir kepemimpinan (2004-2014).

### **H. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan SBY dalam tata kelola pengadaan migas di Indonesia dan juga tentang keadaan keamanan energy di Indonesia.

### **I. Sistematika Penulisan**

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kerangka konseptual, Hipotesa, Metode penelitian, Tujuan penelitian dan juga Sistematika penulisan

**Bab II** akan menjelaskan tentang sejarah perminyakan di Indonesia, menjelaskan tentang sejarah awal mula ditemukan minyak di Indonesia, dengan rincian dari masa pionir sampai saat ini. Akan membahas juga tentang sejarah daerah



di Indonesia yang berpotensi terdapat kandungan minyak didalamnya dan juga membahas tentang beberapa aktor migas yang berperan penting di Indonesia.

**Bab III** akan menerangkan tentang produksi migas di Indonesia, perkembangan produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun, dengan menyajikan tabel-tabel diagram berbagai macam perkembangan dan data tentang migas di Indonesia. Membahas tentang energy bauran nasional, sampai saat ini minyak bumi masih mendominasi bauran energi primer nasional. Dan juga pada bab ini akan dibahas tentang pengusahaan migas di Indonesia beserta system kontrak yang dijalankan Indonesia sampai saat ini dalam pengelolaan pengadaan migas.

**BabIV** akan menjelaskan tentang kebijakan tata kelola pengadaan migas di Indonesia pada masa kepemimpinan SBY. SBY mengeluarkan kebijakan mengenai keamanan energi nasional pada masa pemerintahannya dan juga pemerintah Indonesia membuka membuka peluang investasi asing dan membuka diri kepada beberapa MNC asing untuk berinvestasi di Indonesia.

**BabV** berisi tentang kesimpulan-kesimpulan secara keseluruhan dari bab